

**DIREKTORAT RISET
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASAYRAKAT**

2022 2026



ROADMAP PENELITIAN

NASKAH ROADMAP PENELITIAN



Disusun Oleh :

- 1. Mochammad Tanzil Multazam, M.Kn.**
- 2. Noor Fatimah Mediawati, M.H.**

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Tahun 2022**

ROADMAP PRODI HUKUM

A. Definisi *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama 3 tahun lamanya. SDGs akan mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

B. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *NO ONE LEFT BEHIND*. SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional.

Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dikutip dari Bappenas antara lain sebagai berikut:

1. Menghapus Segala Bentuk Kemiskinan.
2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Mencanangkan Pertanian Berkelanjutan.
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia.
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua.
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan.
6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi secara Berkelanjutan.
7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi.

10. Mengurangi Ketimpangan Dalam dan Antar Negara.
11. Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.
13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya.
14. Melestarikan Samudera, Laut, dan Sumber Daya Kelautan secara Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati.
16. Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan.
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030

Target Penelitian dengan Tujuan SDGs:

Bidang Unggulan *Roadmap* Penelitian Prodi Hukum dengan Tema Unggulan : Bisnis, Sosial, dan Humaniora.

Penguatan Struktur, Kultur Sosial, SDM, Pembaruan Hukum, Inovasi Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan Kelembagaan Yang Produktif, Berkinerja Tinggi dan Berdaya Saing.

Tema Unggulan : (Prodi Memilih Tema Unggulan Sesuai Kesepakatan Bersama Dosen)

1. Penguatan Hukum Perdata dan Hukum Pidana dalam Upaya Pembaruan Hukum Indonesia.
2. Pemerintahan yang efektif

Inovasi pada hukum bisnis untuk kesejahteraan masyarakat

Issu-Issu Strategis	Pemecahan Masalah	Topik Riset yang Diperkuat	Detail Topik Kajian Keilmuan	Kinerja Performan Indikator
Semakin berkembangnya intangible asset	Memahami portofolio UMKM sebagai intangible asset	Portofolio UMKM sebagai jaminan dalam pemberian kredit	<ul style="list-style-type: none">- Paten, Merek sebagai portofolio UMKM- Intangible asset sebagai jaminan kredit/ pembiayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Prosiding Nasional & Internasional2. Jurnal Nasional Terakreditasi3. Jurnal Internasional Bereputasi4. Buku ajar BerISBN5. Prototipe6. HaKI7. Paten8. Produk-Kebijakan9. Kesesuaian roadmap dosen dengan penelitian mahasiswa

	<p>Penilaian Portopolio UMKM sebagai persyaratan pemberian kredit</p>	<p>Mekanisme penilaian portofolio sebagai jaminan dalam pemberian kredit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dalam pemberian kredit - Aspek penilaian agunan 	
	<p>Memahami konsep asset menurut KUHPerdara, Hukum Perbankan, UU ITE</p>	<p>Analisa perjanjian kredit & jaminan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - analisis kontrak 	
<p>maraknya isu wanprestasi dalam kontrak bisnis</p>	<p>Urgensi perlindungan hukum para pihak dalam kontrak bisnis, khususnya dalam hal ketenagakerjaan dan asuransi</p>	<p>Kontrak : instrumen perlindungan hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan hukum pekerja - Perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi mutual di Indonesia 	

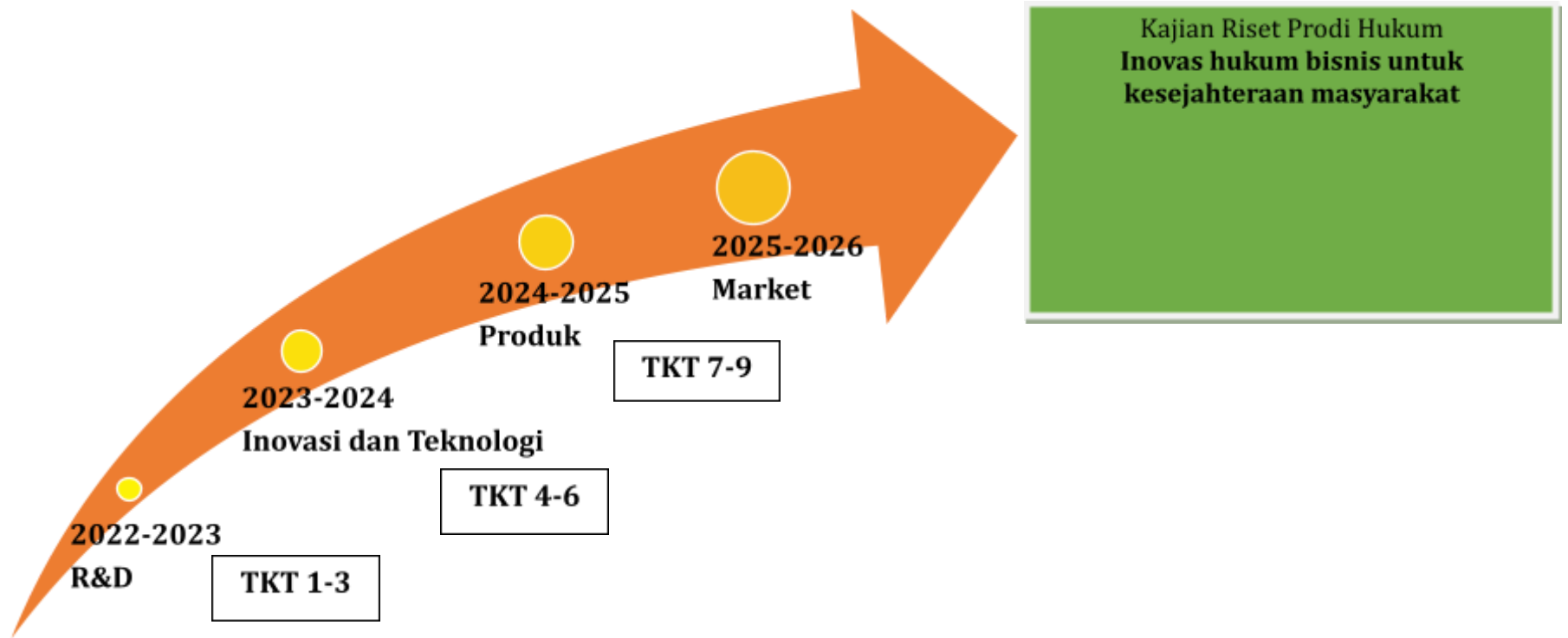
	Pemenuhan tanggung jawab para pihak dalam kontrak bisnis	Bentuk tanggung jawab para pihak dalam kontrak bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab perusahaan - Tanggung jawab pekerja - Tanggung jawab perusahaan asuransi mutual di Indonesia 	
	Pemenuhan syarat keabsahan kontrak bisnis	Analisis kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - analisis kontrak : keabsahan kontrak, unsur-unsur kontrak (esensialia, naturalia, aksidentalialia), unsur subyektif dan obyektif kontrak, akibat hukum kontrak 	
Kerusakan lingkungan hidup	1.Urgensi perlindungan hukum warga negara atas Lingkungan Hidup	instrumen perlindungan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan hukum setiap warga negara di bidang lingkungan hidup - 	

	<p>2. Tanggung jawab Perusahaan dan pelaku usaha terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.</p>	<p>Bentuk tanggung jawab pemerintah dan perusahaan atau pelaku usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab pemerintah - Tanggung jawab perusahaan - Tanggungjawab pelaku usaha 	
	<p>3. Aktualisasi kesejahteraan bagi</p>	<p>Analisis keseimbangan hak warga negara dan Tanggungjawab pemerintah dan perusahaan terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Terhadap Undang – Undang yang Lingkungan Hidup yang sudah ada. 	
<p>Tata Kelola pemerintahan di daerah dan desa cenderung koruptif</p>	<p>Demokratisasi Tata Kelola Pemerintahan dan keuangan Daerah</p>	<p>Demokrasi dan Demokratisasi Tata kelola Daerah/Desa berbasis Moral agama di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi Ajaran Agama dan Kearifan Lokal Dalam konstruksi demokrasi Di Indonesia; 2. Nilai agama sebagai Basis Moralitas tata kelola Pemerintahan di Daerah/Desa; 3. Tata kelola Pemerintahan Daerah/Desa Berbasis Moral agama; 	

			- Model pembentukan regulasi daerah/desa berbasis ajaran agama.	
		Aktualisasi konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Tata kelola Pemerintahan Daerah/Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisasi konsep AUPB berbasis kearifan lokal di Indonesia; 2. Aktualisasi konsep AUPB dalam Tata kelola keuangan Daerah/Desa; 3. Eksistensi AUPB dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia; 4. Reaktualisasi AUPB berbasis nilai agama dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah/desa 	
	Penguatan Lembaga dan Skema Penegakan Hukum administrasi	Penguatan lembaga Penegak Hukum Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan tata kelembagaan dan tata kerja penegak hukum administrasi di daerah; 2. Kedudukan, peran dan fungsi Ombudsman dalam skema demokratisasi dan perlindungan hukum bagi rakyat; 3. Pembaruan sistem penegakan hukum prefentif dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah/desa. 	

			4. Aktualisasi sistem penegakan hukum administrasi berbasis HAM yang Indonesiawi.	
Meningkatnya kegiatan transaksi secara elektronik	penguatan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan.	Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan di daerah/desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model penguatan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum di daerah; 2. Pembaruan model pembentukan regulasi daerah pro masyarakat sipil; 3. Model ruang publik demokratis dalam skema partisipasi publik di daerah/desa. 	
	Model transaksi elektronik melalui bockchain	Keabsahan hukum model transaksi elektronik melalui bockchain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan smart contract 2. Tanda tangan digital dalam teknologi blockchain 3. Perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik pada BC 4. Legal audit pada smart contract 5. Identifikasi kejahatan pada ekosistem blockchain 	

			6. Pengambilan alat bukti pada ekosistem blockchain	
	Perlindungan data pribadi	Penggunaan data pribadi sebagai komoditas dagang	Data pribadi pada bisnis berbasis sentral data base Data pribadi pada bisnis berbasis blockchain 1. Batasan pada perdagangan data pribadi	
	Profesi notari di era digital	Verlijden pada profesi notaris di era digital	Berhadapan, membacakan, dan menandatangani pada profesi notari di era digital	



Sidoarjo, 15 Sptember 2022



Mengetahui,
Dekan FBHIS

Dr. Ponggah Setiyono, SE, MSi, PhD
NIDN. 0007127301



Kepala Program Studi Hukum

Nou. Fatimah Mediawati, SH., MH.
NIDN. 0008058101



Menyetujui,
Direktur DRPM

Dr. Sigit Hermawan, M.Si, CIQaR
NIDN. 0003127501